

**TESIS**  
**KEWENANGAN PERADILAN MILITER**  
**DALAM MENINDAK ANGGOTA TNI YANG**  
**MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM**



**Oleh**

**Suprobo Rini**  
**2320215320044**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**  
**2025**

**KEWENANGAN PERADILAN MILITER  
DALAM MENINDAK ANGGOTA TNI  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
UMUM**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**SUPROBO RINI  
2320215320044**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis** : KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM  
MENINDAK ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA UMUM

**Nama** : Suprobo Rini

**NIM** : 2320215320044

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing**



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
NIP. 19810517200511001**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 2 September 2025**

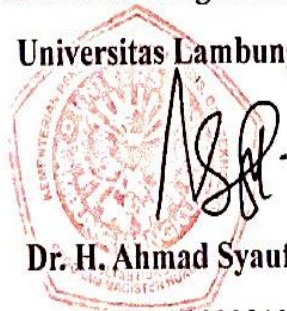
**Pembimbing**



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
NIP. 19810517200511001**

**Disahkan oleh**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

**Tesis ini telah dipertahan  
Di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 17 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi , S.H.,M.H.**

**Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

**Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.**

## SURAT PERNYATAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprobo Rini  
Nim : 2320215320044  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,

  
Suprobo Rini

NIM 2320215320044

RINI, SUPROBO, 2025. “ KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENINDAK ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H.,M.H. H 103 Halaman.

## **RINGKASAN**

Kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum, yang secara normatif seharusnya diperiksa dan diadili melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, realitas hukum menunjukkan bahwa hingga saat ini praktik pengadilannya masih berada dalam yurisdiksi peradilan militer. Permasalahan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik peradilan di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan akan efektivitas supremasi hukum, prinsip equality before the law, serta integritas sistem peradilan pidana nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu: pertama, mengapa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tetap diperiksa dan diadili di peradilan militer; dan kedua, bagaimana akibat hukum terhadap anggota TNI yang telah terbukti melakukan tindak pidana umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan, serta mengamati praktik peradilan militer terhadap pelanggaran hukum oleh anggota TNI. Secara konseptual, tesis ini berpijak pada teori sistem peradilan, teori kewenangan, dan teori kepastian hukum. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan ketetapan MPR, Hasil kajian menunjukkan bahwa masih berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh institusi militer untuk mempertahankan yurisdiksinya, meskipun ketentuan tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan dengan semangat reformasi hukum dan demokratisasi pascareformasi 1998. Salah satu studi kasus, seorang jurnalis yang tewas akibat dugaan pembunuhan oleh anggota TNI AL, yang justru diproses dalam peradilan militer. Kasus ini menegaskan urgensi reformasi sistem peradilan militer agar lebih akuntabel, transparan, dan menjamin hak-hak korban serta keadilan bagi masyarakat sipil. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan militer perlu segera diharmonisasi. Pemerintah dan DPR RI diharapkan dapat segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, agar sistem hukum Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif dan menjamin kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, termasuk bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.

RINI, SUPROBO, 2025. “ KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENINDAK ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing : Dr. Suprpto, S.H.,M.H. H 103 Halaman.

## **ABSTRAK**

kewenangan peradilan militer dalam memeriksa dan mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum, serta menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap prajurit TNI yang terbukti bersalah dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Latar belakang permasalahan berangkat dari disharmoni antara ketentuan normatif dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum apabila melakukan tindak pidana umum, dengan kenyataan praktik peradilan yang masih menggunakan yurisdiksi peradilan militer. Ketidaksiuaian tersebut menimbulkan persoalan dalam konteks kepastian hukum, akuntabilitas peradilan, dan implementasi prinsip equality before the law dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun secara teoritis dan normatif peradilan umum telah ditetapkan sebagai forum yang berwenang mengadili prajurit TNI dalam perkara pidana umum, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan proses peradilan. Hal ini diperkuat dengan dalih belum adanya peraturan peralihan atau peraturan pelaksana yang secara eksplisit mencabut kewenangan tersebut dari peradilan militer. Dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan kekaburan norma dan ketidakpastian hukum, serta membuka ruang bagi intervensi institusional yang dapat melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Studi kasus pembunuhan seorang jurnalis bernama Juwita oleh anggota TNI menjadi ilustrasi konkret dari permasalahan tersebut. Penanganan kasus oleh peradilan militer menuai kritik publik karena dianggap menutup akses terhadap keadilan yang terbuka dan imparial. Temuan ini menegaskan urgensi pembaharuan hukum melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan implementasi penuh ketentuan Pasal 65 UU Nomor 34 Tahun 2004 agar sistem peradilan nasional lebih menjamin keadilan substantif, kesetaraan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia

Kata Kunci : Peradilan Militer, Tindak Pidana Umum, Kewenangan Tentara Nasional Indonesia

RINI, SUPROBO, 2025. "THE AUTHORITY OF MILITARY COURTS IN TAKING ACTION AGAINST TNI MEMBERS WHO COMMIT GENERAL CRIMES". Master of Law Program, Faculty of law , Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Supervisor: Dr. Suprpto, S.H.,M.H. , 103 Pages

### **ABSTRACT.**

*The authority of military courts in examining and trying members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit general crimes, as well as analyzing the legal consequences that arise for TNI soldiers who are proven guilty of committing these crimes. The background to the problem stems from the disharmony between the normative provisions in Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces, which states that TNI soldiers are subject to the authority of general courts when committing general crimes, with the reality of judicial practice which still uses the jurisdiction of military courts. This discrepancy raises problems in the context of legal certainty, judicial accountability, and the implementation of the principle of equality before the law in the national legal system. This research uses a normative juridical approach combined with case studies, with data collection techniques including literature review and in-depth interviews with law enforcement actors from both the general and military courts. In its discussion, this research draws on theories of the judicial system, authority, and legal certainty to examine the absolute authority of military courts and its limitations following legal reform.*

*The research findings show that although theoretically and normatively, general courts have been designated as the authorized forum to try TNI soldiers in general criminal cases, Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice continues to be used as the legal basis for the implementation of the judicial process. This is reinforced by the pretext that there are no transitional regulations or implementing regulations that explicitly revoke this authority from military courts. In practice, this situation creates unclear norms and legal uncertainty, and opens up space for institutional intervention that can undermine the principles of transparency and accountability. The case study of the murder of journalist Juwita by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) provides a concrete illustration of this problem. The handling of the case by military justice has drawn public criticism for allegedly blocking access to open and impartial justice. These findings underscore the urgency of legal reform through a revision of Law Number 31 of 1997 and the full implementation of Article 65 of Law Number 34 of 2004 to ensure that the national justice system better guarantees substantive justice, legal equality, and respect for human rights.*

*Keywords: Military Justice, General Crimes, Authority, Indonesian National Armed Forces*

## MOTO

Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan

(QS Al-Insyirah:6)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta Ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

### **Ayah dan Ibu terkasih,**

Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, **Ayah Suwito Dan Ibu Salasiah** yang telah merawat, menjaga, dan mendidik peneliti hingga saat ini dengan seluruh tenaga dan keringat yang tidak dapat peneliti balaskan. Diucapkan terima kasih pula atas kesabaran, dukungan, serta kepercayaan yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan .

### **Kakakku,**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Apt,Suntami,S.Fram** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

### **Dosen pembimbing tesis,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya besarnya **kepada Bapak Dr. Suprpto, S.H.,M.H.**, atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penelitian dan penulisan tesis yang berjudul “Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum ” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa disampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat tertata dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Maka dalam kesempatan kali ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah Swt. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian penelitian dan penulisan tesis ini, di antaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan

- menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
  3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
  4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**, selaku Sekretaris Tim Penilai Usulan Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
  5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum acara;
  6. teman-teman Program Magister Hukum Angkatan 2023, terutama **Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan dukungan kepada peneliti selama masa perkuliahan; serta
  7. Sahabat dan terkasih terdekat peneliti , Parindra Ari Prakoso, Nohidayah,S.H.,M.H , Muhammad Deny Sugiyanto,S.H.,M.Kn , Dinda Shinta Meylani,S.H , Pandu Aditya,S.M, yang telah memberikan dukungan selama menempuh perkuliahan telah kebersamai dan saling mendukung sekian lama ini.
  8. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran serta masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat menjadi sumber

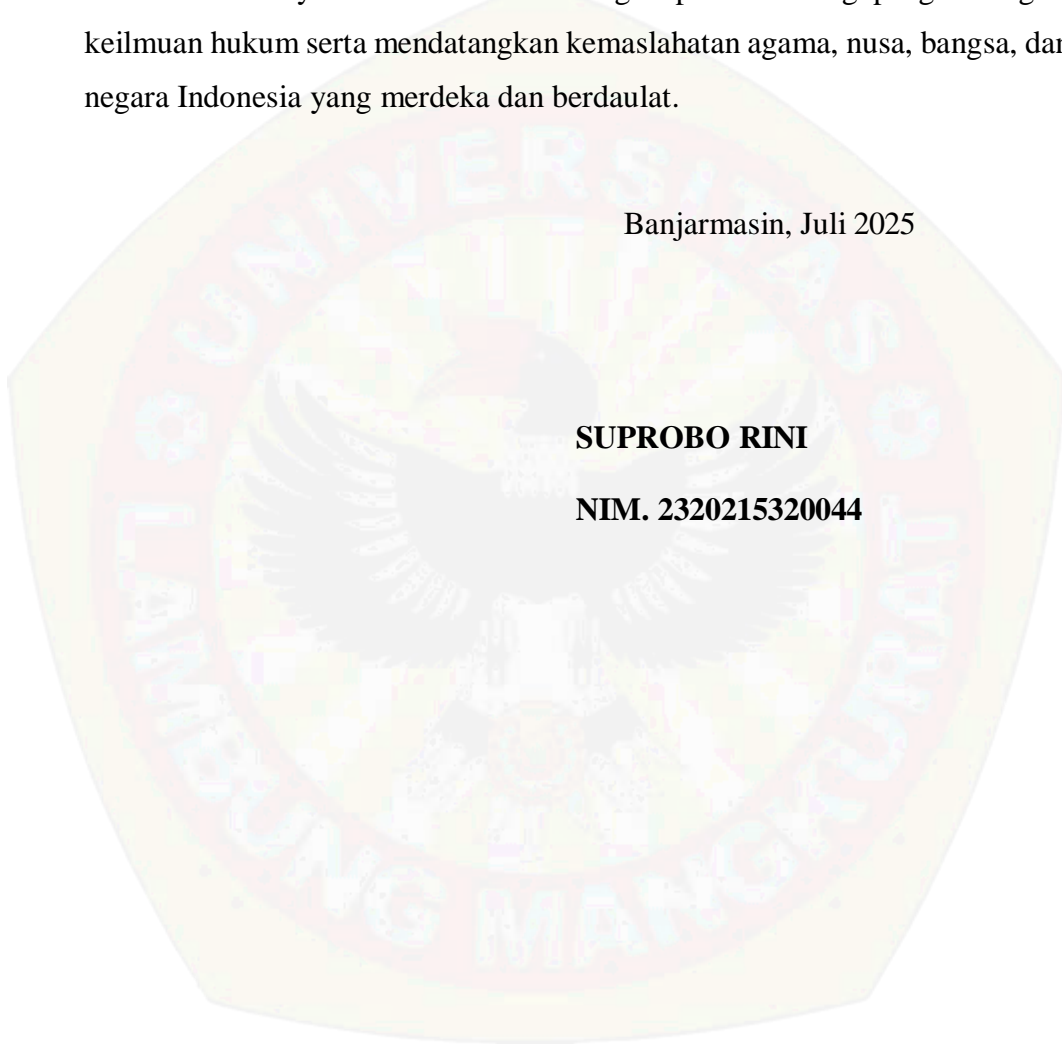
inspirasi bagi mahasiswa lainnya dan dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juli 2025

**SUPROBO RINI**

**NIM. 2320215320044**



## DAFTAR ISI

## HALAMAN

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN .....                          | i    |
| HALAMAN JUDUL DALAM .....                          | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                           | iii  |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....         | v    |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                           | vi   |
| RINGKASAN .....                                    | vii  |
| ABSTRAK .....                                      | viii |
| ABSTRACT.....                                      | ix   |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                 | x    |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                          | xi   |
| DAFTAR ISI .....                                   | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1    |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH .....                    | 1    |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                           | 11   |
| C. KEASLIAN PENELITIAN .....                       | 12   |
| D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....            | 15   |
| 1. Tujuan Penelitian .....                         | 15   |
| 2. Kegunaan penelitian.....                        | 16   |
| E. TINJAUAN PUSTAKA .....                          | 16   |
| 1. Tinjauan Teoritis .....                         | 16   |
| 2. Tinjauan Konseptual .....                       | 26   |
| F. METODE PENELITIAN.....                          | 37   |
| 1. Jenis Penelitian .....                          | 37   |
| 2. Sifat Penelitian .....                          | 37   |
| 3. Tipe Penelitian .....                           | 38   |
| 4. Pendekatan Penelitian .....                     | 38   |
| 5. Sumber Bahan Hukum .....                        | 39   |
| 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....            | 41   |
| 7. Teknik Analisa Bahan Hukum .....                | 42   |
| G. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN ..... | 43   |

|   |     |
|---|-----|
| BAB II KEWENANGAN PERADILAN MILITER MENINDAK ANGGOTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM TETAP DIPERIKSA DAN DIADILI MELALUI PERADILAN MILITER BUKAN MELALUI PERADILAN UMUM ..... | 45  |
| A. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan Militer .....  | 45  |
| B. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Memeriksa dan Mengadili Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang .....                           | 55  |
| C. Asas Lex Spesialist Derogat Legi Generali Terhadap Peradilan Militer .....   | 59  |
| D. Penafsira Pasal 65 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI.....   | 63  |
| E. Prinsip Personalitas Dalam Peradilan Militer .....   | 66  |
| BAB III AKIBAT HUKUM ANGGOTA TNI YANG TELAH TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM .....   | 69  |
| A. Tindakan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota TNI yang terbukti telah melakukan Tindak Pidana Umum .....   | 69  |
| B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak pidana Umum yang Telah Dilakukan oleh Anggota TNI .....   | 88  |
| C. Dampak Hukum Terhadap Anggota TNI yang telah terbukti melakukan tindak pidana umum .....   | 98  |
| BAB IV PENUTUP .....  | 100 |
| A. KESIMPULAN .....   | 100 |
| B. SARAN .....  | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 104 |